

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pencapaiannya bisa terukur.

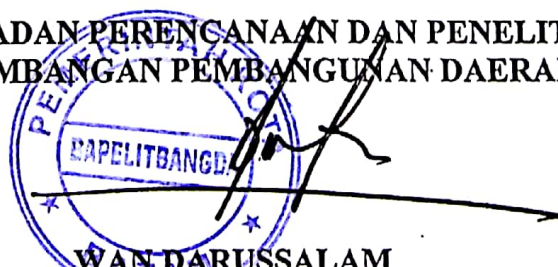
Renstra Bapelitbangda disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi misi Kota Batam sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2016-2021.

Semua unit kerja, pimpinan dan staf Bapelitbangda memiliki konsekuensi untuk melaksanakan Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Bapelitbangda, yaitu "**Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Yang Berkualitas**", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Akhirnya Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap pimpinan dan staf Bapelitbangda untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Bapelitbangda yang baik.

Batam, Januari 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH


WAN DARUSSALAM
NIP. 196220416 198603 1 033

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah yang juga melibatkan peran swasta dan masyarakat. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan pemangku kepentingan di daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Walaupun peraturan per undang-undangan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan koridor aturan perundang-undangan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintahan pusat, dokumen perencanaan pemerintah dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dokumen perencanaan Provinsi yang juga terdiri dari RPJPD, RPJMD serta RKPD Provinsi, sehingga diharapkan pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan Provinsi serta Nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Pemerintahan di atas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang turut memberi warna bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang selanjutnya mewajibkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dan Rencana Kerja Setiap Tahun yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi yang disusun secara berurutan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis OPD hingga kepada Rencana Kerja OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 mengatur lebih detail tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan yang dibutuhkan oleh setiap

tingkatan pemerintahan. Aturan tentang isi dan tata cara prosedur penyusunan mulai dari RPJP yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun, RPJM dengan durasi waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Tahunan Pemerintah yang diharapkan akan menunjukkan satu garis tegas keterkaitan dari setiap dokumen perencanaan agar terjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah sebagai salah satu OPD yang tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah selaku salah satu satuan kerja perangkat daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyusun program-program pembangunan baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang akan melibatkan semua unsur pemerintah daerah dalam upaya mencapai terwujudnya Good Governance khususnya di bidang perencanaan setiap satuan kerja perangkat daerah dan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama periode 2016-2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan OPD Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam setiap tahunnya.
2. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program Pemerintah Kota Batam.

1.4 Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang stratanya lebih tinggi dalam artian dokumen induk dari perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota seperti dokumen RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 dan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Sebagai sebuah organisasi yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, maka dengan kondisi tersebut tentu saja aparatur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam harus memiliki sebuah komitmen yang bersifat mengikat bagi seluruh aparatur perencana yang ada di Bapelitbangda Kota Batam, yang bertujuan agar roda perencanaan yang dimotori oleh Bapelitbangda dapat terlaksana sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

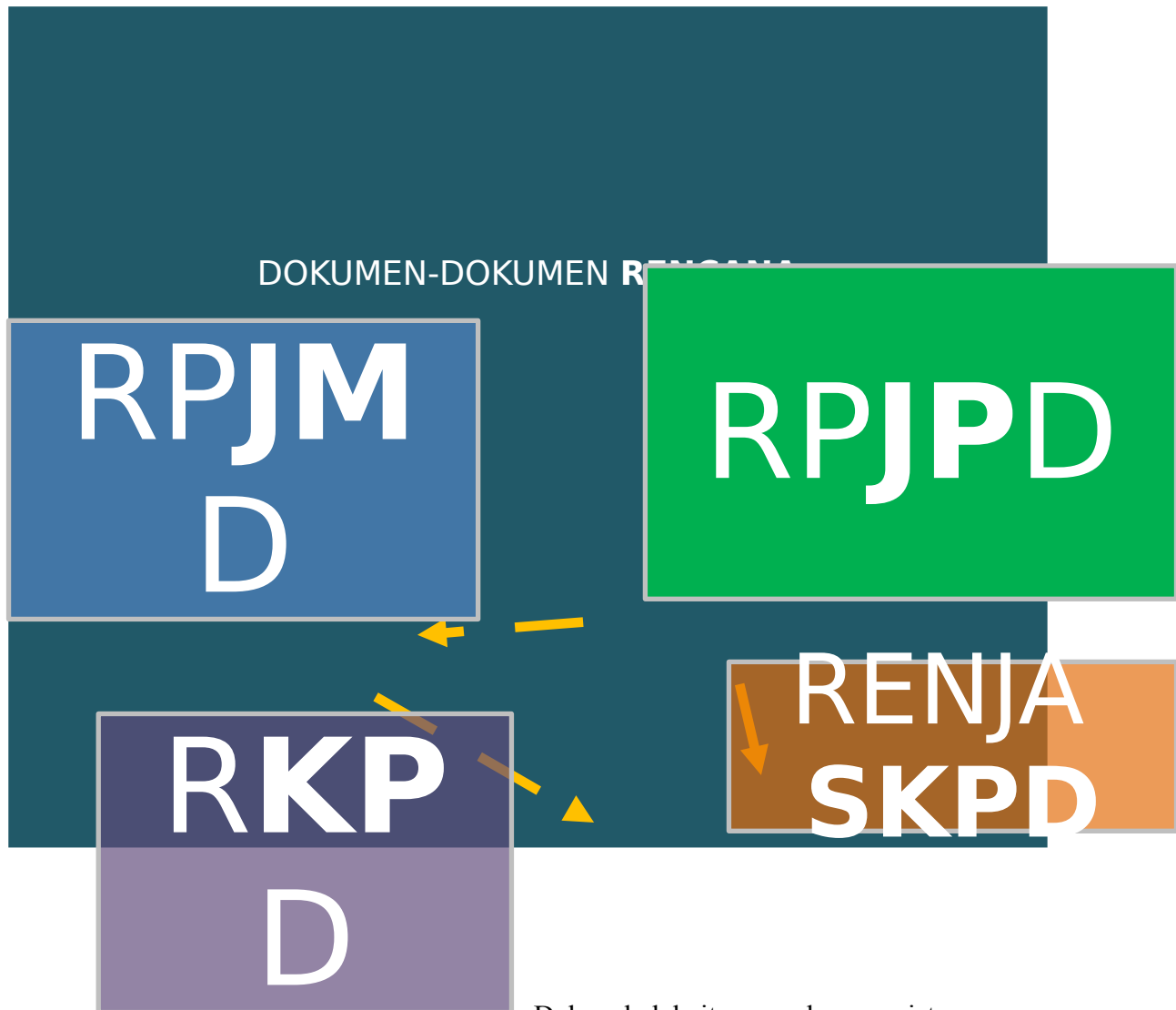
Komitmen dan koridor tersebut adalah visi yang jelas, lalu dijabarkan dalam beberapa misi, selanjutnya berdasarkan misi yang telah dicetuskan, dilakukan kajian manajemen dalam bentuk identifikasi masalah dan kondisi yang ada, baik dari luar maupun dari dalam yang disusun dalam format analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menghasilkan beberapa strategi atau kebijakan.

Renstra OPD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program masing-masing OPD, berhubungan erat dengan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Selanjutnya, Renstra OPD juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja OPD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD setiap tahunnya yang selanjutnya akan menjadi rincian APBD.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

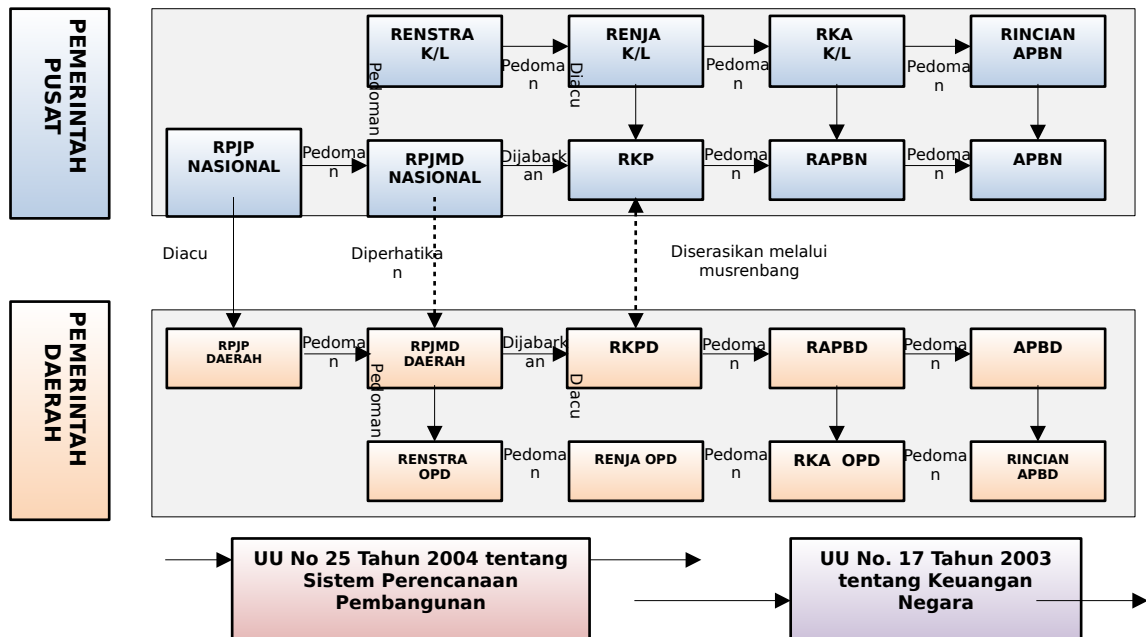
pembangunan daerah yang bertingkat. Oleh karena itu Renstra OPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RenstraOPD harus sinkron dan sinergi antar OPD yang merupakan tugas Bapelitbangda dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Gambar I.1
Hubungan Renstra OPD
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Renstra OPD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD untuk setiap tahunnya, dan harus dijadikan pedoman bagi penyusunan RKA OPD yang merupakan masukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra OPD, serta perencanaan keuangan daerah.

Gambar I.2
Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat maupun Daerah



1.5 Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021 ini terdiri atas 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan, serta hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) yang memuat gambaran umum Bapelitbangda, Tugas Dan Fungsi Organisasi Bapelitbangda.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang, analisis Renstra K/L, dan telaahan tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang disertai dengan tujuan dan sarasanya.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB 6 INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BATAM

Bab ini memuat dan menjelaskan indikator kinerja Bapelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, susunan organisasi Bapelitbangda terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Pemerintahan, Ekonomi, sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektifitas
 - c. Sub Bidang Data, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
5. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
 - b. Sub Bidang Keuangan, Investasi Dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengembangan Wilayah
- b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman
- c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan, Statistik dan Persandian

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. KEPALA BADAN

Tugas Pokok: memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - f. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan
 - g. penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota.
 - h. penyusunan rencana kerja tahunan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang kota.
 - i. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Badan.
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan.
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
- d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

C. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

D. BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- Fungsi
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

E. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

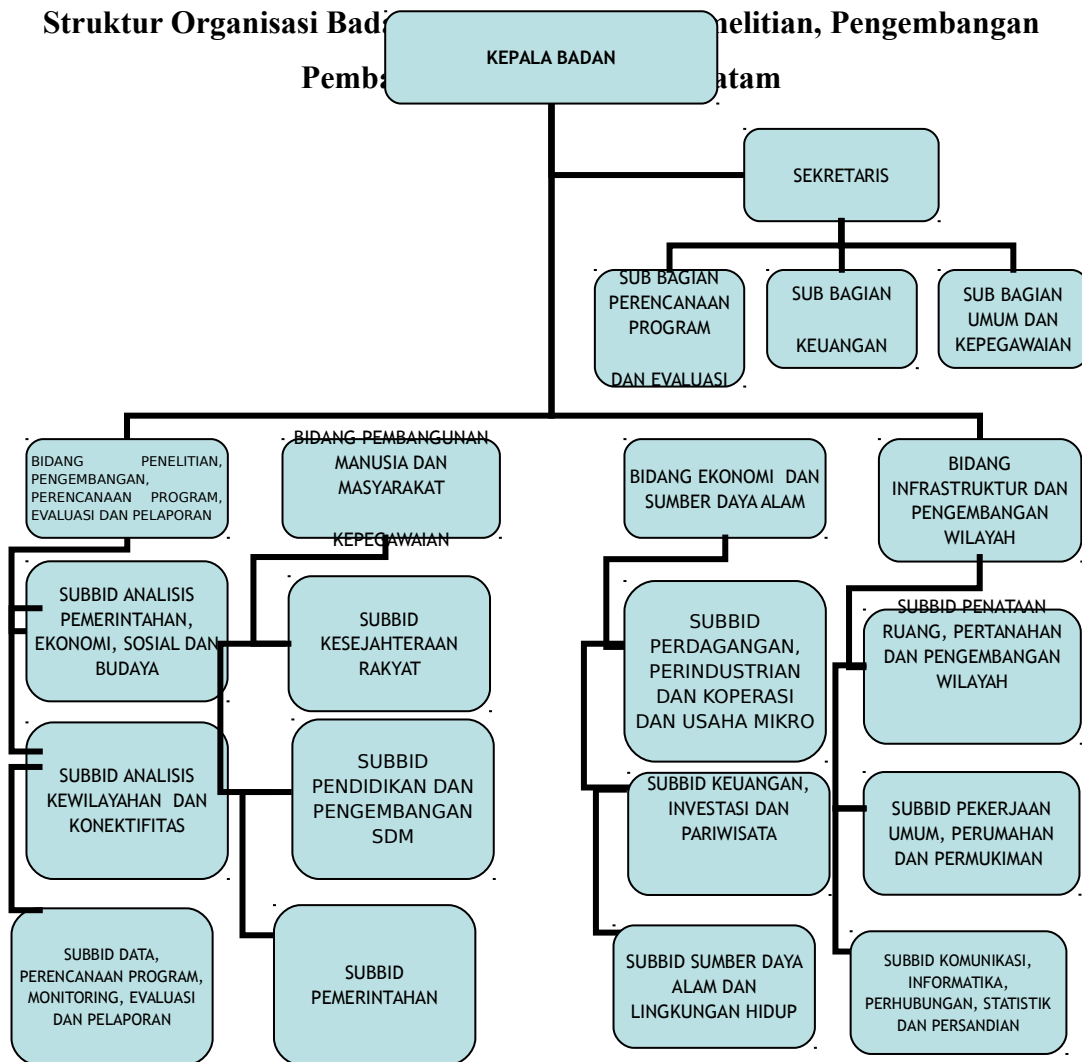
- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas Pokok: melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Gambar II.1



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Bapelitbangda Kota Batam memiliki 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Harian Lepas untuk melaksanakan tugas pada Kantor Bapelitbangda Kota Batam, untuk melihat lebih jelas tentang jumlah komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1

Jumlah PNS dan THL

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	34
2	Tenaga Harian Lepas	6
Jumlah		40

Sumber : Bapelitbangda Desember 2016

Dari jumlah pegawai sebanyak 40 orang terbagi pada setiap bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian

No	Bagian/Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kasubbag	3
5	Kasubbid	12
6	Staf	19
Jumlah		40

Sumber : Bapelitbangda Desember 2016

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka susah dalam bersaing dalam era globalisasi.

Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan latar belakang pendidikan pegawai akan dapat memberikan bantuan didalam melakukan pekerjaan, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3

Jumlah PNS Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	2
4	D.III	1
5	DIV / S.I	22
6	S.2	8
7	S.3	1
Jumlah		34

Sumber : Bapelitbangda Desember 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Kinerja Bapelitbangda Kota Batam sampai akhir periode rencana strategis adalah:

1. Terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota
2. Mengikuti musrenbang provinsi dan nasional
3. Tersusunnya RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan RKA sebagai dokumen perencanaan pembangunan
4. Terselenggaranya workshop bidang litbang

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dari masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang cenderung mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.
4. Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan.
5. Belum optimalnya sumber daya aparaturnya baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapelitbangda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat dalam penyusunan perencanaan yang terkadang sering berubah-ubah membuat sebagian aparatur perencana sulit memahaminya.

2. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis dikarenakan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan terkadang kurang tersosialisasi secara baik di tingkat daerah, kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur yang mengakibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal
3. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.

4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.

5. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.

Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

6. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hal ini merupakan salah satu kendala yang amat penting dalam penyusunan perencanaan, dikarenakan dengan rendahnya partisipasi masyarakat tersebut maka penyerapan aspirasi belum optimal yang mana aspirasi tersebut merupakan bahan yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan.

7. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah pada Kota Batam sangat mempengaruhi pada penyusunan rencana oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah.

Terutama halnya pada Kota Batam yaitu adanya perubahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga menjadi masalah tersendiri dalam menyusun rencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016-2021:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

- Batam** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warga-nya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.
- Bandar Dunia** : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellent*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.
- Madani** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

- Berdaya Saing** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.
- Maju** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- Sejahtera** : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.
- Bermartabat** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

5.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Misi Kedua : Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

Misi Ketiga : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

Misi Keempat : Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola

ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

Misi Kelima : *Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.*

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Misi Keenam : *Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) administrator.

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014.

Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*). Sebagai *think tank*, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/

evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugastugas lainnya dari Presiden/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan. Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Kementerian PPN/Bappenas.

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. Sumber Daya Manusia Perencana

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan

perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antardaerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antardaerah.

Ada beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah yang bersangkutan, seperti konflik antardaerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan keberlanjutan pembangunan di daerah-daerah pemekaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu

ketidaksiapan pemerintah daerah yang baru untuk melakukan akselerasi pembangunan dikarenakan keterbatasan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Cepat atau lambat, kondisi ini turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut.

Kedua, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung menimbulkan potensi konflik komunal, yang terjadi pada suatu komunitas dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki laut yang luas dengan beragam suku dan budaya, tidaklah dapat disangkal. Keragaman geografis, suku, budaya, dan agama atau keyakinan memunculkan karakteristik personal atau komunitas yang berbeda. Selama masa Orde Baru, komunikasi yang terbangun adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah tampak jelas dalam program-program pembangunan. Secara faktual kondisi ini kurang menguntungkan bagi upaya pengembangan saling pengertian antar suku dan kelompok masyarakat tentang keragaman suku dan heterogenitas di Indonesia.

Fenomena konflik komunal seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam sepuluh tahun terakhir dapat menjadi bukti konsekuensi kekurangberhasilan akulturasi ini. Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti kekurangpedulian elit politik, perilaku korup dan mementingkan kelompok atau golongan sendiri, yang telah memberikan pengaruh sangat kuat bagi terbentuknya ketidakpercayaan antarelemen masyarakat. Ketidakpercayaan tersebut merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional. Ketiga, dampak lainnya adalah jumlah penduduk yang bertambah, semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam serta fenomena bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini.

Meningkatnya jumlah penduduk akibat pemerintah daerah kurang tanggap terhadap masalah keluarga berencana, menuntut penyediaan berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan. Apabila kegiatan ekonomi terus terpusat di Jawa, maka ketersediaan lahan subur akan semakin berkurang. Lahan pertanian yang subur di Jawa secara cepat akan beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Konversi lahan akan menurunkan kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi yang pada akhirnya berdampak pada

menurunnya produktivitas hasil pertanian. Wawasan lingkungan belum dihayati secara penuh. Aktivitas peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, persawahan, pertambakan, perindustrian, pertambangan; dan masalah kebakaran hutan, serta makin meningkatnya pembalakan liar (illegal logging) mengakibatkan deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan, perubahan iklim serta terganggunya kondisi tata air.

Gejala kerusakan tata air terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah, diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 10% per tahun.

d. Globalisasi

Di samping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai universal tersebut berkembang dari keseluruhan proses perjalanan bangsa-bangsa di dunia.

Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan, akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi, dan keterbukaan. Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat

internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma modern yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional. Kemudian, gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dimulai dari awal kehidupan hingga berakhirnya kehidupan. Kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Saat ini sedang semarak muncul kegiatan yang dimulai dengan awalan huruf *e* seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *elaboratory*, *e-biodiversity*, dan yang lainnya yang berbasis elektronika.

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan data dan informasi tersendiri dengan menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasi yang relevan. Namun demikian, seperti kemajuan di bidang apa pun, kemajuan teknologi informasi selain menimbulkan efek positif juga mengakibatkan terjadinya efek negatif dalam bentuk ancaman terhadap keamanan dan bidang-bidang lainnya. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara. Secara praktis perkembangan TI telah memberikan banyak kemudahan dalam menunjang aktivitas manusia. Teknologi juga memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang dahulunya sulit dilakukan menjadi mudah, misalnya mengerjakan beberapa aktivitas kantor di rumah dan tidak perlu datang ke kantor. Kantor dalam

pengertian fisik, saat ini bukanlah tempat satusatunya dimana pegawai suatu organisasi harus mengerakkan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Beberapa pekerjaan dapat dilakukan di rumah, rapat dengan pimpinan dan kelompok kerja di rumah dengan menggunakan internet working tanpa harus kehilangan waktu dan biaya karena kemacetan, transportasi, dan sebagainya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah:

”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

- Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a) mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b) mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d) menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan

pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengambil kebijakan (policy maker).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Presiden, kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil

think tank, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai think tank ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (brand image) Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational brand image building).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat,

sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

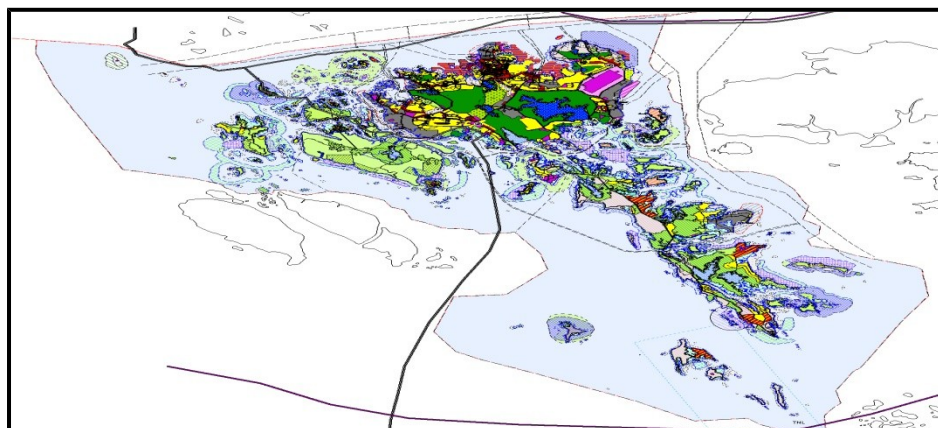
3.4 Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Batam

Kondisi Geografis Daerah

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional dengan garis lintang dan bujur terletak antara 0° 25' 29" -1° 15' 00" Lintang Utara dan 103° 34'35" - 104° 26' 04" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Batam 426.563,28Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108.265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318.298.28. Wilayah Kota Batam meliputi lebih dari 400 (*empat ratus*) pulau, 329 (*tiga ratus dua puluh sembilan*) pulau diantaranya telah mempunyai nama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Batam



Sumber: Buku RTRW Kota Batam

Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan.

Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan.

Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar baik wisata bahari dan terutama wisata sejarah.

b. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir

pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan.

Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum.

Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m.

Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah yaitu:

(1) *Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah.*

Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau sech serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.

(2) *Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku.*

Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

c. Iklim dan Curah Hujan

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2015 berkisar antara 22^oc hingga 25^oc dan suhu maksimum antara 32^oc hingga 34^oc. Suhu rata-rata minimum sepanjang tahun 2015 adalah 22^oc dan suhu rata-rata maksimum adalah 34^oc. Tekanan udara minimum per bulan berkisar antara 1.005 sampai 1.009 mb (milibar) dan tekanan maksimum per bulan berkisar antara 1.015 sampai dengan 1.017 mb. Rata-rata tekanan udara minimum pada tahun 2015 sebesar 1.005 mb dan rata-rata tekanan maksimum sebesar 1017 mb.

Kelembaban udara minimum berkisar antara 42 persen sampai 55 persen dan kelembaban udara maksimum berkisar antara 97 persen sampai 99 persen dengan kelembaban udara rata-rata minimum sebesar 42 persen dan maksimum 99 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 16 sampai 29 knot dengan rata-rata kecepatan maksimum 29 knot sedangkan rata-rata kecepatan minimum sebesar 6 knot.

Banyaknya hari hujan di Kota Batam pada tahun 2015 sebanyak 112 hari dengan curah hujan sebanyak 1.344,5 mm. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2014 bayaknya hari hujan berkurang sebanyak 59 hari atau 52,68 persen sedangkan curah hujan berkurang sebanyak 681,40 mm atau 50,68 persen.

d. Demografis

d.1. Penduduk

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam Tahun 2011 tercatat sebanyak 1.137.894 jiwa, Tahun 2012 tercatat sebanyak 1.235.651 jiwa terdiri dari 638.404 jiwa atau 51,67% laki-laki dan 597.247 jiwa atau 48,33% perempuan. Pada tahun 2013 berjumlah 1.135.412 jiwa, Tahun 2014 berjumlah 1.030.528 jiwa, dan pada semester I tahun 2015 jumlah penduduk Kota Batam berjumlah 1.031.121 jiwa, terdiri dari 531.969 jiwa atau 51,59 persen penduduk laki-laki dan 499.152 jiwa atau 48,41 persen penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada semester I tahun 2014 berjumlah 1.169.761 jiwa. maka terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 13,45 persen atau sebanyak 138.640 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

*Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar
Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015*

Kecamatan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	SMT I 2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Belakang Padang	24.469	25.184	24.137	21.608	21.857
Bulang	12.223	12.687	11.299	11.484	11.614
Galang	15.842	17.468	16.419	16.955	16.507
Sei Beduk	123.189	126.697	107.928	88.858	89.251
Nongsa	61.737	66.150	62.140	57.601	59.219
Sekupang	136.579	148.927	137.472	123.972	126.027
Lubuk Baja	109.438	114.093	105.114	94.249	93.947
Batu Ampar	97.465	101.035	86.986	73.443	76.579
Bengkong	120.639	127.744	115.912	104.398	104.717
Batam Kota	152.976	175.515	165.271	152.737	153.729
Sagulung	170.238	188.317	176.491	165.517	162.870
Batu Aji	113.099	131.834	126.243	119.706	114.804
Jumlah	1.137.894	1.235.651	1.135.41	1.030.528	1.031.121

			2		
--	--	--	---	--	--

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Jumlah penduduk Kota Batam sejak diberlakukannya perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara nasional terjadi perubahan, hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2013 telah diadakan pembersihan data ganda nasional oleh Tim Pengolah Data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis data ganda dan perekaman KTP-el Batam yang terekam ganda akan dibersihkan atau dihapus dari data base kependudukan Kota Batam, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada semester I tahun 2015, penduduk Kota Batam terpadat masih berada di wilayah kecamatan *mainland* yaitu Kecamatan Sagulung dan Batam Kota sedangkan yang terendah berada pada wilayah kecamatan *hinterland* yaitu Kecamatan Bulang dan Galang.

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kota Batam pada semester I tahun 2015 berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah 107, yang berarti setiap 107 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Dengan perkataan lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

d.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2. Penggunaan Lahan berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

No.	JENIS PENGGUNAAN	LUAS	
		m ²	Ha
1	LINDUNG		
	a. Buffer Jalan	109,000	10.90
	b. Genangan	117,100	11.71

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah 2016-2021

	c. Hutan Bakau	20,740,000	2,074
	d. Hutan Buru	21,660,000	2,166
	e. Hutan Kota	119,577,700	11,957.7 7
	f. Hutan Lindung	144,800,000	14,480
	g. Hutan Wisata	9,016,000	901.60
	h. Waduk	31,070,000	3,107
	i. Sempadan Pantai	4,863,000	4,863.30
	TOTAL KAWASAN LINDUNG	351,952,800	35,195.2 8
2	BUDIDAYA		
	a. Fasilitas Pelabuhan	22,460,000	2,246
	b. Fasilitas Umum	23,300,000	2,330
	c. Jasa	56,240,000	5,624
	d. Kawasan Bandara	12,260,000	1,226
	e. KKOP	1,554,000	155,4
	f. Wisata	100,600,000	10,060
	g. Perikanan	2,381,000	238.13
	h. Industri	129,300,000	12,930
	i. Permukiman	182,900,000	18,290
	j. Pertanian/Peternakan	138,400,000	13,840
	k. Pusat Pemerintahan	667,500	66.75
	l. Infrastruktur Jalan	60,634,700	6,063.47
	TOTAL KAWASAN BUDIDAYA	730,697,200	73069.72

		1,082,650,00	
	TOTAL KESELURUHAN	0	108,265

- **Struktur Ruang Wilayah**

- Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:
 1. Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;
 2. Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan
 3. Pusat Lingkungan (*Neighbourhood Services Center*), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (*neighbourhood unit*).
- Dalam jangka waktu Tahun 2011-2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.
- Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam

(pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

- Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (*outlet*) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga *outlet* di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (*hub international port*).
- Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di P. Rempang dan/atau Galang.
- Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (*outlet*) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (*flyover*), simpang susun (*interchange*), jalan lintas bawah (*underpass*), dan jaringan transportasi massal (*MRT/LRT*) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
- Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.

• **Pola Ruang Wilayah**

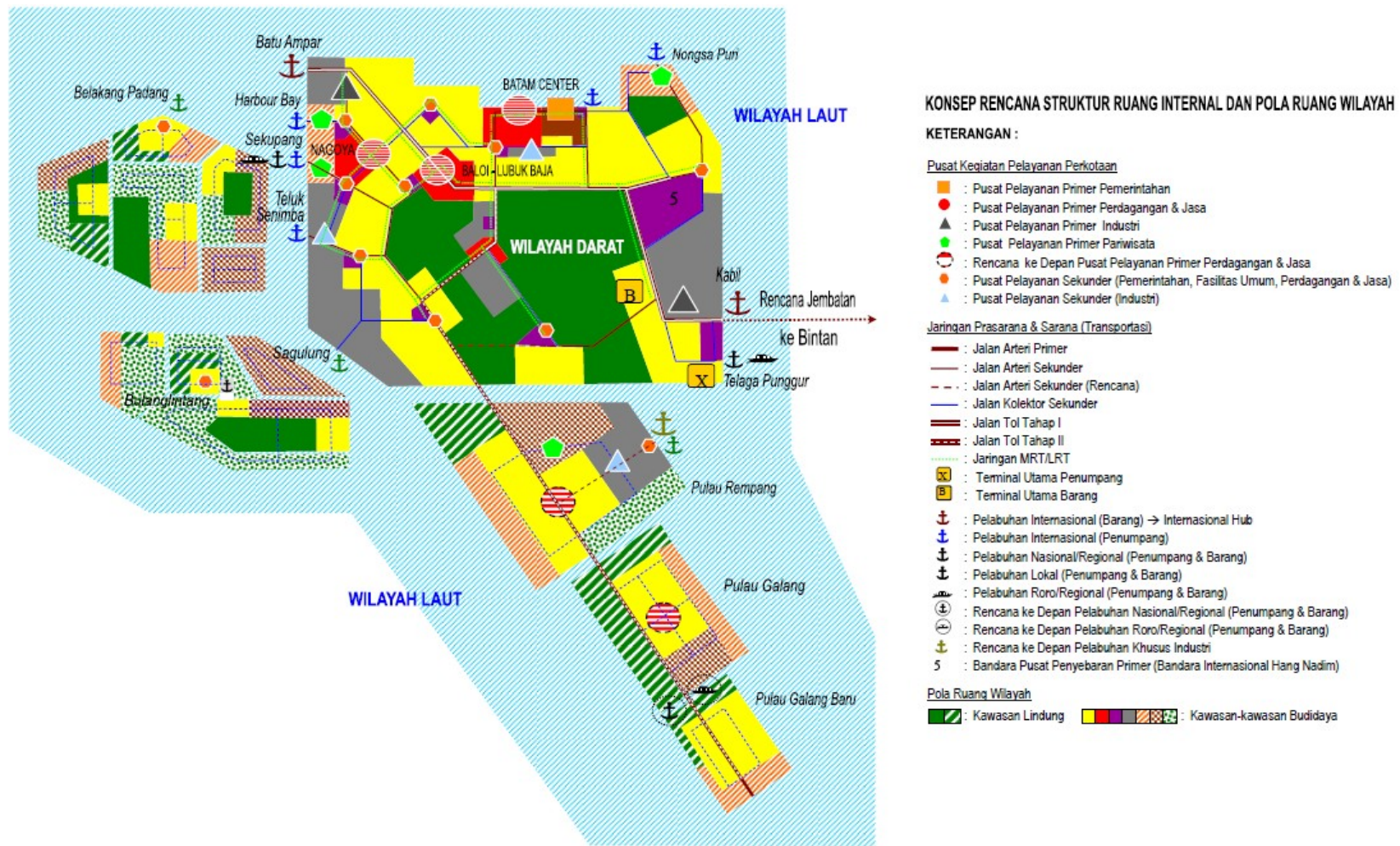
- Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;
- Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
- Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
- Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada kawasan-kawasan pemanfaatan yang tersedia di P. Batam, selanjutnya ke pulau-pulau yang lain dari delapan pulau yang telah ditetapkan;
- Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara delapan pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI);
- Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah 2016-2021

- Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di P. Batam, P. Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;
- Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di P. Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan

- Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian,

keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.



- Gambar 2. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah

- d.3. Wilayah Rawan Bencana

- Kota Batam beriklim tropis dengan Suhu rata-rata minimum sepanjang tahun 2015 adalah 22⁰c dan suhu rata-rata maksimum adalah 34⁰c. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 16 sampai 29 knot disamping itu curah hujan di Kota Batam relatif tinggi dengan karakteristik wilayah yang berlembah dan berbukit serta memiliki besarnya luasan wilayah laut serta wilayah pantai, dimana hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kejadian rawan bencana di Kota Batam. Kondisi rawan bencana yang sering terjadi di Kota Batam adalah bencana kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, bencana gelombang pasang, abrasi pantai dan rawan terhadap pencemaran tumpahan minyak kotor yang terbawa air laut sehingga membawa kerugian khususnya terhadap masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.

- Namun kejadian rawan bencana di Kota Batam masih dikategorikan ke dalam bencana lokal dan dapat cepat ditanggulangi dan jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Penanggulangan pasca bencana biasanya dilakukan langsung melalui pendirian posko darurat penanggulangan bencana, penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan, tenda dan bahan bangunan untuk para korban di bawah koordinasi dinas sosial dengan melibatkan pihak terkait antara lain badan pengusaha kawasan, pihak keamanan, kecamatan, kelurahan serta elemen masyarakat. Langkah-langkah penanggulangan bencana dalam RPJMD Kota Batam diakomodir melalui kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana Pemerintah Kota Batam yang dituangkan dalam program pengendalian banjir dan pengamanan tebing/pantai serta program penanggulangan bencana serta jaminan sosial.

- Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari:

- *Kawasan Rawan Banjir*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
- *Kawasan Rawan Longsor*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;

- *Kawasan Rawan Abrasi*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan
- *Kawasan Rawan Gerakan Tanah* yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.
- *Kawasan Rawan Gelombang Pasang* yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang.
-
- **Potensi Unggulan Daerah**
 - Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat dilihat dari komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk memahami sektor-sektor manakah yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah.
 - Pada Tahun 2014 perhitungan PDRB secara nasional mengalami perubahan tahun dasar, dari Tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010. Adapun perubahan tahun dasar tersebut dapat dijelaskan selama kurun waktu sepuluh tahun, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas, perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke

2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts 2008* (SNA2008). Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB dan menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.
 - Secara rinci potensi unggulan daerah Kota Batam menurut sektor/kategori usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

- Tabel 3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB

- Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)
 - tahun 2011-2015

Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015**
1)	(2)	3)	4)	5)	6)	7)
A	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,22	,16	,11	1,09	1,10
B	- Pertambangan dan Penggalan	0,10	,09	,09	0,08	0,08
C	- Industri Pengolahan	55,97	5,66	5,69	55,77	55,68
D	- Pengadaan Listrik dan Gas	1,41	,41	,38	1,33	1,30
E	- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	,21	,21	0,21	0,20
F	- Konstruksi	-	1	1	-	-

		18,40	8,43	8,62	18,79	18,40
-	G	-	-	-	-	-
	- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,06	,31	,24	6,32	6,73
-	H	-	-	-	-	-
	- Transportasi dan Pergudangan	3,11	,16	,20	3,05	3,09
-	I	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,20	,23	,25	2,32	2,42
-	J	-	-	-	-	-
	- Informasi dan Komunikasi	2,38	,56	,55	2,56	2,62
-	K	-	-	-	-	-
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	,80	,76	3,69	3,52
-	L	-	-	-	-	-
	- Real Estate	1,60	,59	,59	1,57	1,55
-	M	-	-	-	-	-
,N	- Jasa Perusahaan	0,01	,01	,01	0,01	0,01
-	O	-	-	-	-	-
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,13	,10	,08	1,06	1,11
-	P	-	-	-	-	-
	- Jasa Pendidikan	1,03	,01	,01	0,98	0,99
-	Q	-	-	-	-	-
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	,82	,78	0,77	0,78
-	R	-	-	-	-	-
,S,T,U	- Jasa lainnya	0,47	,45	,43	0,41	0,43
-	- Produk Domestik Regional Bruto	100,00	00,00	00,00	100,00	100,00

- * Angka sementara

- ** Angka sangat sementara

- Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar *harga konstan 2010* menurut lapangan usaha dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam dengan kontribusi sebesar 55,68 persen pada tahun 2015. Sektor konstruksi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan kontribusi yang terus meningkat sampai dengan tahun 2014 dan menjadi unggulan ke dua pada PDRB Kota Batam dengan kontribusi dari 18,26 persen menjadi 18,79 persen pada tahun 2014 dan diprediksi sebesar 18,40 persen pada tahun 2015. Peran serta sektor perdagangan besar dan eceran, memberikan kontribusi sebesar 6,73 persen pada tahun 2015 dan merupakan sektor unggulan ke tiga dalam PDRB Kota Batam. Kontribusi terbesar ke empat adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi 3,52 persen diikuti sektor transportasi dan pergudangan sebesar 3,09 persen. Selanjutnya sektor terakhir yang memberikan sumbangan paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya sebesar 0,08 persen.

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selain pemerataan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya barang dan jasa yang bisa dihasilkan, yang berarti akan lebih banyak orang yang dapat ikut menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. Namun jika barang dan jasa yang dihasilkan bertambah tanpa disertai dengan pemerataan akan menambah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar daerah

- Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar *harga konstan 2010*, pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 persen, pada tahun 2012 sebesar 7,40 persen pada tahun 2013 sebesar 7,00 persen, pada tahun 2014 sebesar 7,99 persen dan pada tahun 2015 diprediksi sebesar 6,33 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

-

-

-
-
-
-
-
-

- Tabel 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam,
- Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010
- Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2011-2015

-

Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015**
1)	(2)	3)	(4)	5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,43	2,52	2,55	5,50	6,91
B	Pertambangan dan Penggalian	1,18	1,16	0,94	0,94	4,31
C	Industri Pengolahan	6,99	6,80	7,07	8,15	6,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,06	6,87	5,23	3,36	4,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,34	5,41	6,45	5,65	2,84
F	Konstruksi	8,67	7,53	8,10	8,98	4,16

-	G-	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-
			10,93	11,75	5,92	9,28	13,27	
-	H-	Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
			7,77	9,10	8,30	2,87	7,60	
-	I-	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	-	-	-
			8,64	8,92	8,02	11,24	11,27	
-	J-	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
			7,12	15,77	6,49	8,56	8,58	
-	K-	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	-
			14,56	5,85	5,87	5,95	1,49	
-	L-	Real Estate	-	-	-	-	-	-
			6,31	6,53	7,07	6,59	5,14	
-	M-	Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-
,N			6,89	8,08	6,24	5,16	2,14	
-	O-	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
			7,07	4,67	5,12	6,15	10,69	
-	P-	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-
			4,12	5,49	6,08	5,28	6,87	
-	Q-	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-
			5,64	4,72	2,29	6,90	8,06	
-	R-	Jasa lainnya	-	-	-	-	-	-
,S,T,U			-0,70	3,84	1,05	3,85	11,61	
-	-	Produk Domestik	-	-	-	-	-	-

- * *Angka sementara*

- ** *Angka sangat sementara*

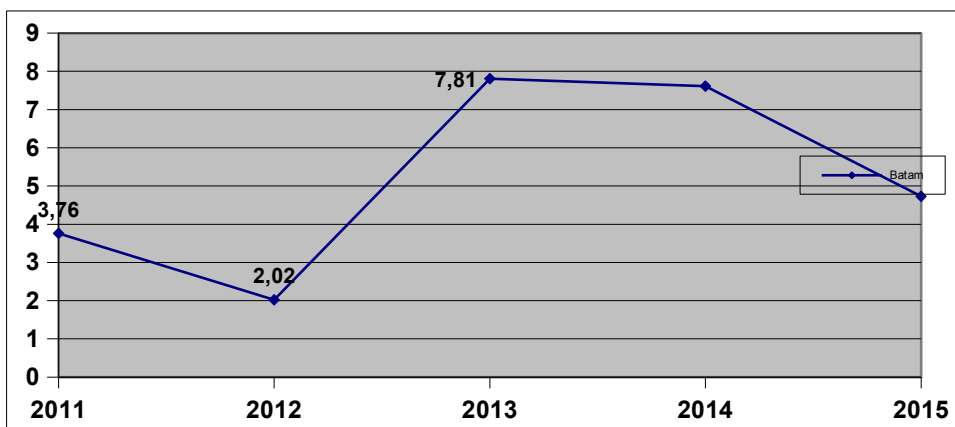
-

Inflasi

- Inflasi tahun kalender Tahun 2015 (Januari sampai Desember) Kota Batam adalah sebesar 4,73 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,88 persen bila dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2014 dengan inflasi sebesar 7,61 persen. Besar inflasi pada bulan Desember adalah 0,99 persen. Andil dominan Inflasi pada bulan Desember disumbangkan oleh kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,83 persen dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,04 persen serta kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa sebesar 0,11 persen. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

-
-
-

- Gambar 4. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kota

Batam

Selama bulan Desember 2015 terjadinya perubahan harga pada 120 komoditi kebutuhan masyarakat menjadi pemicu terjadinya Inflasi di Kota Batam, dimana sebanyak 75 komoditi/jasa diantaranya mengalami kenaikan harga/tarif, antara lain: cabai merah, cabai rawit, bayam, bawang merah, celana dalam wanita, sepatu olah raga pria, kentang, sawi hijau, daging ayam ras, biaya pengiriman barang, tomat buah, kakap putih, cabai hijau, semangka, telur ayam ras, daun singkong, melon, bawang putih, bahan katun, angkutan udara, sate, bawal, tisu, apel, mobil, gula pasir, kakap merah, cumi-cumi, garam, layang/benggol dan kacang hijau. Sebaliknya, 45 komoditi lainnya justru mengalami penurunan harga/tarif, antara lain: kacang panjang, ketimun, tomat sayur, buncis, pir, labu siam/jipang, sawi putih, kacang tanah, jeruk nipis/limau, minyak goreng, sotong, bawang bombay, selar/tude, mujair, kol putih/kubis, jagung manis, paku, tongkol/ambu-ambu, pengharum/pelembut cucian, wortel, lada/merica, kepiting/rajungan, ikan mas, panci, emas perhiasan, sekolah dasar dan kaos dalam/singlet.

a. Fasilitas Infrastruktur

• **Kondisi Jalan**

Pembangunan Infrastruktur jalan sebagian besar sudah mampu membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian kota. Perkembangan kondisi jalan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

- Tabel 5. Perkembangan Sarana Jalan di Kota Batam

- Tahun 2012 s/d 2015

Tahun	Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak	Jumlah
	Aspal	Gravel	Earth	Di	Total

<i>Y e a r</i>	<i>alt ed</i>		<i>th</i>	<i>nc i - U ns pe cif ie d</i>	
<i>- (1)</i>	<i>- (2)</i>	<i>- (3)</i>	<i>- (4)</i>	<i>- (5)</i>	<i>- (6)</i>
<i>- 2 0 1 2</i>	<i>- 931, 23</i>	<i>- 73,0 0</i>	<i>- 84, 85</i>	<i>- -</i>	<i>- 1.08 9,08</i>
<i>- 2 0 1 3</i>	<i>- 947, 13</i>	<i>- 73,0 0</i>	<i>- 68, 95</i>	<i>- -</i>	<i>- 1.18 3,13</i>
<i>- 2 0 1 4</i>	<i>- 926, 22</i>	<i>- 123, 89</i>	<i>- 48, 27</i>	<i>- -</i>	<i>- 1.09 8,38</i>
<i>- 2 0 1 5</i>	<i>- 967, 18</i>	<i>- 117, 44</i>	<i>- 13, 76</i>	<i>- -</i>	<i>- 1.09 8,38</i>

- Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

- Fasilitas Air Bersih.

- Sejak bulan November 1995 pengadaan dan pengusahaan air bersih di Pulau Batam dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan ini memudahkan pendanaan swasta

dalam membiayai sejumlah pekerjaan perbaikan dan pengembangan sistem distribusi.

- Sumber air bersih yang memasok kebutuhan air di Pulau Batam berasal dari air baku yang terdapat pada beberapa WTP yang tersebar di Kota Batam, antara lain yaitu WTP Sei Baloi, WTP Sei. Ladi, WTP Sei. Harapan, WTP Sei Nongsa, WTP. Muka Kuning, WTP Tanjung Piayu dan WTP Duriangkang, dengan kapasitas desain WTP sebesar 3.000 liter/detik dimana banyaknya air yang distribusikan pada tahun 2014 adalah :

- Rumah Tempat Tinggal dan Instansi Pemerintah 72,41%
- Industri 8,09%
- Badan sosial, Rumah Peribadatan dan Rumah Sakit 4,50%
- Niaga (Hotel, Taurism) 14,52%
- Pelabuhan / Bandara 0,46%

-

- Lokasi Waduk di Kota Batam seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

- Gambar 5. Peta Lokasi Waduk di Pulau Batam

-



-

-
 - Dengan kapasitas produksi sebesar 4.682 lt/det. Gambaran kapasitas waduk di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

- Tabel 6. Kapasitas Air Bersih di Kota Batam Tahun 2015

- Nama Waduk	- Volume (m ³)	- Kapasitas Desain WTP (Lt/Dtk)	- Kapasitas/P roduksi (Lt/Dtk)
- (1)	- (2)	- (3)	- (4)
1. Sei Harapan	3.600.000	210	212,96
-2. Sei Baloi	270.000	30	26,10
-3. Sei Nongsa	720.000	60	85,64
-4. Sei Ladi	9.490.000	240	316,40
-5. Muka Kuning	12.270.000	310	333,52

	-		
-6. Duriangkang	78.1 80.0 00	- 3000	- 1.368,72
7. Rencana Waduk Tembesi	- 41.8 76.0 80	- 600	- -
8. Waduk Rempang	- 5.16 6.40 0	- 232	- -
9. Waduk Sei Gong	- -	- -	- -
- Jumlah	- 151. 572. 480	- 4.682	- 2.343,62

- Sumber : BP Kawasan Batam

-

- Perkembangan Kota Batam yang pesat mengakibatkan kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam, perkembangan usaha dan industri yang mengharuskan untuk mencari alternatif sumber air baku. Mengingat sumber air baku di Kota Batam berasal dari air permukaan / tadah hujan, maka perlu pengamanan lahan di lokasi *Catchment Area*.

-

- Tenaga Kelistrikan

- Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagalistrikan dikelola PT. PLN. Cabang

Tanjung Pinang. Data pengusahaan kelistrikan Batam Tahun 2012-2014 melalui PT. PLN Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

-
-
-
-
-

- Tabel 7. Data Pengusahaan Kelistrikan PT. PLN Batam

- Tahun 2013 s/d 2015

- Indikator	- 2013		- 2014		- 2015	
- Jumlah Pelanggan	25 1.727	6 ,06%	26 8. 77 5	6,77%	2 8 4 2 9 7	5,78%
- Daya Tersambung (KVA)	1.1 17.145	1 0,99%	1.1 92.445	6,74%	1. 260.673	5,72%
- Penjualan T/L (MWh)	1.8 26.037	1 1,06%	1.9 84.749	8,69%	2. 039.244	2,75%
- Jumlah Pendapatan (Jutaan Rupiah)	2.1 52.192	1 4,30%	2.5 17.504	16,97%	2. 716.651	7,91%

- Sumber : PT. PLN Batam

-

- Jumlah pelanggan listrik PLN wilayah khusus Batam sampai dengan tahun 2015 sebanyak 284.297 pelanggan dengan daya tersambung 1.260.673 KVA dan penjualan sebesar 2.039.244 MWh. Komposisi pelanggan pada tahun 2015 dengan jumlah pelanggan rumah tangga sebesar 67,07 persen, pelanggan industri 0,12 persen, pelanggan bisnis/usaha

12,03 persen, pelanggan sosial 0,77 persen, pemerintah 0,42 persen dan jenis pelanggan multiguna sebesar 19,59 persen. Sedangkan pada daya tersambung mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen atau sebanding dengan 68.228 KVA. Kebutuhan kelistrikan Kota Batam 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- Tabel 8. Kebutuhan Listrik Kota Batam

Kebutuhan Listrik Kota Batam 5 Tahun ke Depan	
1. Kapasitas Terpasang MW	374
2. Beban Puncak MW	266
3. Kebutuhan 5 Tahun ke depan	

-
-
-

- **Perhubungan Laut**

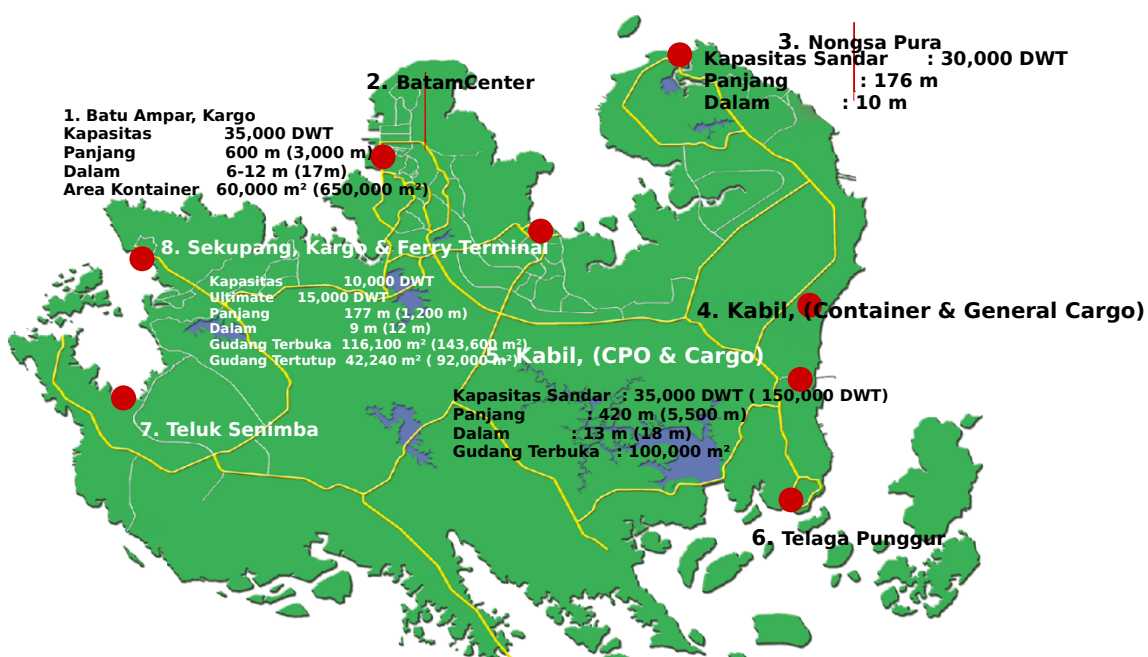
- Untuk menunjang lalu lintas orang dan barang serta bongkar muat barang tersedia beberapa penumpang dan pelabuhan kargo untuk sandar kapal dengan kapasitas sampai dengan 150.000 DWT yang terdapat di Pelabuhan Kabil, sedangkan untuk kapasitas kontainer saat ini sebesar 90.000 TEUs di Pelabuhan Batu Ampar yang rencananya akan terus dikembangkan secara bertahap sampai dengan 4.000.000 TEUs. Sedangkan untuk kapasitas sandar kapal saat ini sebesar 35.000 DWT. Berikut kondisi dan lokasi pelabuhan yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut ini:

-

- Gambar 6. Gambar Dermaga Utara Terminal Batu Ampar



- Gambar 7. Peta Lokasi Pelabuhan Kota Batam



- Untuk menunjang lalu lintas orang saat ini di Kota Batam memiliki beberapa pelabuhan penumpang baik domestik maupun pelabuhan internasional, antara lain Pelabuhan Ferry Sekupang, Pelabuhan Internasional Ferry Batam Center, Pelabuhan Ferry Internasional Nongsa Pura, Teluk Senimba dan Harbour Bay.

-

- Perhubungan Udara

- Sarana dan fasilitas perhubungan udara di Kota Batam selama ini dilakukan pada Bandara Hang Nadim Batam yang melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat. Kondisi kapasitas Bandara Hang Nadim Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

-

- Tabel 9.Kapasitas Bandara Hang Nadim

- DESKRIPSI	- UNIT	- KONDISI SAAT INI	- RENCANA - PENGEMBANGAN AKHIR
- Landasan pacu	- Meter	- 4025 X 45	- 4025 X 45
- Apron	- M ²	- 110,541	- 170,000
- Terminal	- M ²	- 35,122 (2	- 88,000 (12
-	-	Lantai 4 Gar	Pasang Gar
- Jenis pesawat	- Type	Barata)	Barata)
- Kapasitas terminal	- Penuh	- B 747	- B 747
-	-	- 3,300,000	- 8,300,000
- Kapasitas kargo	- Tangkahan	-	-
- Kapasitas penyimpanan bahan bakar	- Ton	- 16,230	- 700,000
	- Kilo liter	- 52,000	- 52,000

- Sumber : BP Kawasan Batam

-

-

- Telekomunikasi dan Informasi

- Perkembangan dunia selular beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat pesat hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penggunaan telepon selular di hampir seluruh pelosok dunia. Pesatnya perkembangan dunia selular juga terjadi di Kota Batam. Meningkatnya penggunaan telepon selular di Kota Batam bisa dilihat dari banyaknya operator selular yang beroperasi di Kota Batam dan berjamurnya menara telekomunikasi yang terus bertambah jumlahnya. Provider yang beroperasi di Kota Batam ada sebanyak 20 provider, dan terdapat 19 penyedia menara dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 437 menara.

- Maraknya keberadaan menara-menara telekomunikasi tersebut disamping memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya disisi lain juga menimbulkan dampak terhadap nilai estetika dan keindahan Kota Batam.

- Guna meminimalisir keadaan tersebut maka berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Kota Batam bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya telah mengupayakan adanya penataan terhadap keberadaan menara-menara telekomunikasi tersebut. Dengan melalui proses yang panjang maka pada tanggal 10 Juli 2009 Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam. Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

- Tabel 10. Fasilitas dan Infrastuktur Telekomunikasi

- N	- URAIAN	- Satuan
- A	- PSTN dan ISDN Switch • Sentral Telepon Otomat	- - 18 Lokasi - 111,768 SST

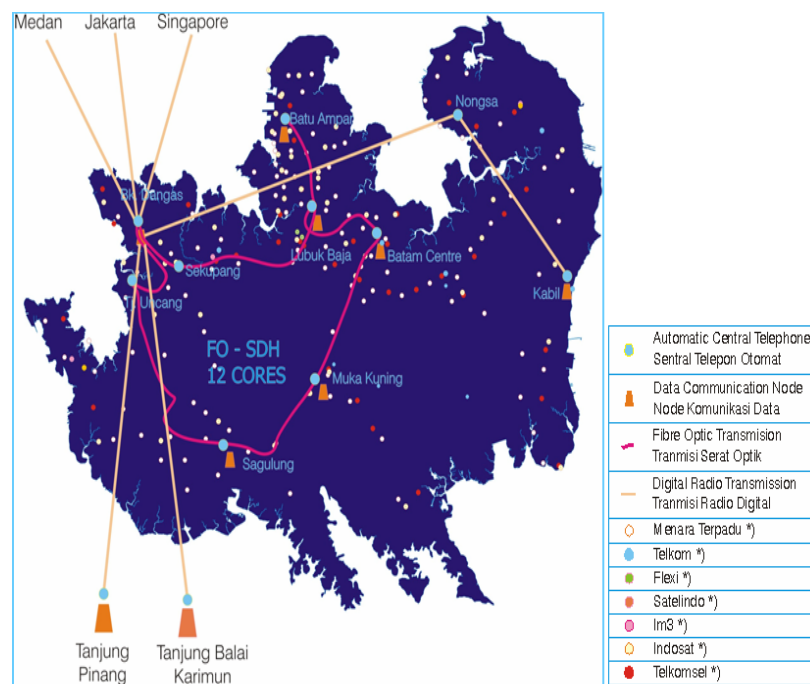
	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Total Sentral 	
- B	<ul style="list-style-type: none"> - CDMA Switch • Kapasitas Sentral • Jumlah BTS 	<ul style="list-style-type: none"> - - 35.000 CDMA - 19 BTS
- C	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Jaringan • Jaringan Kabel Tembaga • Lebar Pita Serat Optik <ul style="list-style-type: none"> - Lokal Batam - Ke kota lain melalui Pekanbaru - Sambungan bawah laut TIS • Lebar Pita Radio Gelombang Mikro Digital <ul style="list-style-type: none"> - Lokal Batam - Ke kota lain melalui Pekanbaru - Ke Singapura • Lebar Pita Satelit Dijital 	<ul style="list-style-type: none"> - - 98.690 Satuan Sambungan - 377,5 Gbps - 15 Gbps - 12,5 Gbps - 350 Gbps - 904 Mbps - - 34 Mbps - 560 Mbps - 310 Mbps - 52 Mbps
- D	<ul style="list-style-type: none"> - Penyedia Layanan Internet 	<ul style="list-style-type: none"> - TELKOMNET INSTAN - INDOSATNET - IDOLANET - CENTRIN

- Sumber : BP Kawasan Batam

-
-
-
-
-
-

- Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

- Gambar 8. Infrastruktur Informasi di Kota Batam (Layanan Telekomunikasi)



- Sumber : BP Kawasan Batam

- Perbankan

- Dalam menunjang aktifitas berbagai usaha, bisnis maupun perdagangan, di Kota Batam saat ini telah beroperasi sebanyak 70 bank yang terdiri dari 41 buah bank umum dengan jumlah kantor sebanyak 191 serta 29 buah bank perkreditan rakyat dengan jumlah kantor sebanyak 45 buah. Jumlah keseluruhan kantor bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat sebanyak 306 kantor. Rincian jumlah bank umum dan BPR yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

- Tabel 11. Jumlah Bank dan Kantor Bank di Kota Batam Tahun 2015

- Jenis Bank	- B a n k	- Kantor Bank
- 1	- 2	- 3
- Bank Umum	-	-
- Bank Persero	- 4	- 91
- Bank Devisa	- 2	- 79
- Bank Non Bank	8	- 5
- Bank Pembangunan Daerah	- 3	- 12
- Bank Asing dan Campuran	- 2	- 4
- Bank Perkreditan Rakyat	- 4	-
- Konvensional	-	- 43
- Syariah	- 2	- 2
	7	
- Jumlah	- 7 0	- 236

- *Sumber: Bank Indonesia Batam*

-

- Investasi

- Berdasarkan data dari BP Kawasan selama periode sampai dengan Juni 2015 dengan total investasi dengan nilai USD 19.827.931.676. dengan rincian investasi pemerintah dengan nilai USD 3.883.157.540, investasi swasta domestik sejumlah USD 5.818.162.660 dan swasta asing dengan nilai USD 10.126.611.476. Pertumbuhan investasi pemerintah sebesar 7,18 persen sedangkan sektor swasta

(domestik dan asing) mengalami pertumbuhan sebesar 13,21 persen dari tahun sebelumnya.

- Beberapa peluang investasi yang masih terbuka dari berbagai sektor kegiatan dalam upaya mengembangkan ekonomi Kota Batam antara lain sektor industri yang meliputi :

- Industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

- Aneka Industri meliputi: konveksi, kimia, logam, pengolahan hasil pertanian, elektronika dan pengolahan kayu,

- Industri berat meliputi industri baja, industri permesinan dan alat pengeboran minyak.

- Sektor Pertanian, meliputi :

- perikanan, peternakan (*Fatening*) dan hortikultura, seperti yang telah dirintis di Pulau Nguan dimana Pulau Nguan akan dimanfaatkan sebagai lokasi pertanian dan perikanan. Hal ini telah dirintis salah satunya dengan kerjasama dengan BPPT melalui pembibitan ikan kerapu yang telah berhasil menikmati panen pertama yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Bapak Walikota Batam beberapa waktu yang lalu.

- Komoditas yang memerlukan teknologi tinggi dan padat modal dapat dilaksanakan oleh pemodal yang berskala besar dan orientasi pasarnya untuk ekspor.

- Komoditas dengan teknologi tidak terlalu tinggi, padat karya dan modal dapat dilaksanakan oleh investor yang berskala usaha menengah dengan orientasi utamanya memenuhi kebutuhan lokal.

- Komoditas dengan teknologi tepat guna, yang tidak memerlukan modal yang terlalu tinggi. Usaha ini diutamakan untuk memenuhi pasar lokal.

-

- Sektor Perdagangan, meliputi :

- Berpeluang pada kegiatan ekspor dan perdagangan retail menengah/besar.

- Potensi investasi di bidang prasarana dan sarana pasar & pergudangan (*Cold Storage*).

- Sektor Pariwisata, antara lain :

- Perjalanan wisata terpadu dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu memberikan suguhan objek wisata, atraksi wisata dan akomodasi.

- Entertainment bisnis yang mengelola pelaksanaan workshop, seminar dan event-event kegiatan berskala internasional.

- Pengembangan kawasan wisata terpadu.

- Pengembangan wisata budaya, sejarah dan bahari.

-

- Sektor Transportasi dan Teknologi, meliputi :

- Pengadaan sarana transportasi darat

- Potensi di bidang transportasi udara
(Batam Airline)

- Investasi di bidang perhubungan laut
(RO-RO)

- Potensi untuk pengembangan teknologi
di bidang informasi *Information Technology* (IT)

-

- Sektor lainnya antara lain sebagai berikut :

- Pengelolaan kebersihan termasuk
pengelolaan sampah

- Pengelolaan limbah industri

- Pengelolaan air bersih

- Pembangunan pusat perkemahan terpadu
dan ketenagalistrikan.

-

- **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

- Kompilasi permasalahan dan potensi strategis merupakan suatu kumpulan yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi statis dan dinamis yang akan mempengaruhi perencanaan pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam jangka menengah dan panjang.

- Beberapa permasalahan dan potensi tersebut antara lain:

A. Potensi

1. Tingginya motivasi aparatur perencana Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Kondisi ini sangat membantu dalam upaya peningkatan kinerja aparatur sehingga dalam penyelesaian masalah serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dapat terlaksana secara baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah. Dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana hal ini akan membuat kondisi dan kemudahan dalam melaksanakan tugas perencanaan.
3. Adanya struktur organisasi yang mendukung. Struktur organisasi merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya struktur organisasi yang mendukung akan membuat suatu sistem kerja pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah. Peran pimpinan dalam pelaksanaan tugas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, dengan adanya ketegasan pimpinan akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga terwujud *team work* dan pada akhirnya perencanaan yang dihasilkan dapat disinkronkan.
5. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perencanaan yang bisa diikuti. Pendidikan dan pelatihan teknis yang sering dilaksanakan oleh instansi pusat, daerah dan lembaga diklat lainnya merupakan peluang yang dapat dijadikan sarana oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana.

6. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan. Berkembangnya dunia informasi baik media cetak mau elektronik dan digital sangat memudahkan dalam penyusunan perencanaan, dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai daerah perdagangan dan jasa sehingga bidang informasi sangat mudah di akses.
7. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda. Keberadaan Bapelitbangda sangat didukung dengan adanya peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Bapelitbangda, sehingga Bapelitbangda memiliki eksistensi yang kuat dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
8. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah.

-

B. Permasalahan

- Isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kota Batam tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan kompilasi permasalahan dan potensi strategisnya yang berasal dari analisis situasi dan kondisi serta keuangan Pemerintah Kota Batam.

- Berdasarkan permasalahan dan potensi strategis serta kriteria, maka isu strategis pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dipilih hal-hal yang dapat ditangani dan atau menjadi landasan penting pembangunan jangka menengah masa tahun 2016-2021. Isu strategis yang berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang.

- Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahapan berikutnya adalah perlunya:

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda;
5. Memanfaatkan *database* pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
6. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
7. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;
8. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;
9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; dan
10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

- Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

-

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi

Perumusan visi dan misi jangka menengah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Untuk itu Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada Bapelitbangda Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam perencanaan pembangunan di Kota Batam.

Proses perencanaan strategis Bapelitbangda Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak lepas dari visi dan misi Kota Batam dari tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi pencapaiannya.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang memuat kemana dan bagaimana Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota

Batam harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Batam.

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka Visi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Yang Berkualitas”

4.1.1 Penjelasan makna visi

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat ditentukan mulai dari tahap perencanaan yang memiliki peran strategis untuk menghasilkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mampu memajukan Kota Batam secara berkelanjutan, memenuhi harapan masyarakat Kota Batam serta menjadi kebanggaan Nasional dalam konstelasi persaingan di tingkat regional dan global.

Mengingat demikian penting dan strategisnya perencanaan pembangunan terhadap eksistensi dan kelangsungan momentum pembangunan di Kota Batam, maka harus terus dilakukan usaha-usaha perbaikan sehingga terwujud proses perencanaan pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinkron.

Keberhasilan perencanaan pembangunan diharapkan mampu menselaraskan langkah-langkah kegiatan pembangunan diantara berbagai fungsi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama, baik dalam dimensi sektoral (*intersectoral*), dimensi institusional (*inter-departmental*), maupun dalam dimensi spasial (*inter-spatial/regional*), sehingga mampu mempertemukan aspirasi dan kebutuhan wilayah akan pembangunan dengan dinamika dan tantangan pembangunan pada tingkat lokal, nasional dan regional dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan secara berkesinambungan.

4.1.2 Pernyataan misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam **bentuk 2 (dua) misi** sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kajian/penelitian.**
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

PENJELASAN MISI

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda. Karena itu, ada 2 (dua) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: **”Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Yang Berkualitas”**.

Penjelasan Makna Misi Pertama:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kajian/penelitian.”

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan pembangunan, diperlukan kajian yang komprehensif dan berkualitas dalam rangka menciptakan perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi Kota Batam.

Bapelitbangda akan melaksanakan peningkatan dan pengembangan kegiatan penelitian yang aplikatif dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang profesional dan berkompeten dibidangnya. Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dikerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten di bidangnya sangat dibutuhkan dalam rangka diperolehnya masukan baik yang bersifat rekomendasi maupun data akurat sebagai dasar penyusunan

perencanaan dan pengambilan keputusan serta aplikatif dalam pengembangannya dilapangannya.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil *think tank*, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Jika peran sebagai *think tank* ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) Bapelitbangda. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Mengingat posisi geografis Kota Batam yang berada di pusat aktivitas ekonomi regional yang sangat dinamis serta semakin beratnya tantangan pembangunan ke depan, maka harus terus diupayakan peningkatan agar kualitas perencanaan mampu memberikan hasil yang antisipatif dan komprehensif, sehingga efektif menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Batam secara berkesinambungan.

Perencanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data pembangunan yang merupakan pondasi dalam penyusunan rencana pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam rangka tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam akan berupaya secara berkelanjutan untuk mewujudkan sistem basis data dan analisis data pembangunan yang berkualitas, sehingga efektif sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kota Batam.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam akan terus berupaya mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan, baik secara sektoral, institusional maupun spasial/regional. Hal ini mengingat bahwa kualitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh masukan dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan fungsional atau struktural dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam akan berupaya untuk mewujudkan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan yang efisien dan berkualitas secara berkeBappedajutan di Kota Batam. Kegiatan ini penting dalam arti, yakni *pertama*, untuk mengetahui tingkat keselarasan antara rencana yang telah ditetapkan dengan rencana yang dijaBappedakan. *Kedua*, penting untuk mengetahui secara dini perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian (*adjustment*) seperlunya. *Ketiga*, penting mengingat hasil evaluasi pembangunan merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk bahan masukan perencanaan pembangunan berikutnya.

Penjelasan Makna Misi Kedua:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”

Sebagai institusi perencana, tugas pokok dan fungsinya melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Batam yang berkualitas, dengan tetap mempertimbangkan terciptanya keseimbangan atau harmoni, baik dalam dimensi sektoral, institusional maupun spasial atau regional. Keberhasilan menghasilkan keluaran (*output*) perencanaan yang berkualitas sangat ditentukan oleh penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatoris, dimana keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan di Kota Batam merupakan syarat penting (*necessary condition*) yang harus dipenuhi.

Proses perencanaan dengan skala Kota Batam yang harus mengakomodir aspirasi masyarakat umum baik yang disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Kota maupun melalui perwakilan di lembaga legislatif seyogyanya difasilitasi oleh sarana dan prasarana yang mumpuni dari segi kuantitas serta kualitas

sehingga proses penyusunan rencana pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali atas dukungan dari sumber daya manusia (aparatur) perencanaan yang berkualitas. Hal ini mengingat kedudukan strategis aparatur perencana sebagai fasilitator keseluruhan proses perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan keluaran (*output*) yang berkualitas juga. Dalam rangka demikian, maka Bapelitbangda akan melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan untuk mewujudkan aparatur yang tangguh, terampil, profesional dan aspiratif dengan kualitas kinerja yang tinggi, melalui berbagai kesempatan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi pendidikan formal, non formal, teknis dan struktural, yang diselenggarakan oleh badan pemerintah maupun non pemerintah di Kota Batam atau di luar Kota Batam.

Bapelitbangda bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dalam rangka:

1. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar OPD, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, maupun antara pusat dan daerah.
2. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Badan

Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka BAPELITBANGDA Kota Batam memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan Kota Batam
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bapelitbangda

4.2.2 Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah 2016-2021

dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran pada Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas
2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian dan Pengembangan
3. Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
			Target	Target	Target	Target	Target
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Kota Batam	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	75%	85%	90%	95%	95%
		Persentase Dokumen Perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	75%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renja OPD yang sesuai dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Jumlah Kajian / Penelitian yang mendukung dalam Kebijakan Perencanaan	5 Kajian/ Penelitian	6 Kajian/ Penelitian	7 Kajian/ Penelitian	8 Kajian/ Penelitian	9 Kajian/ Penelitian
		Persentase data yang tersedia sebagai bahan perencanaan	75%	80%	85%	90%	100%
Meningkatkan kualitas kelembagaan Bapelitbangda	Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021

		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	40%	45%	50%	55%	60%
--	--	---	------------	------------	------------	------------	------------

4.3 Perumusan Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Identifikasi isu-isu strategis dibagi ke dalam beberapa batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan ancaman organisasi). Isu-isu strategis ini berasal dari beberapa isu yang kemudian ditelaah secara kritis sehingga didapatlah isu-isu strategis bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam sebagai berikut :

Analisis Faktor Internal

Kekuatan yang terdiri dari :

1. Tingginya motivasi kerja pegawai
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan
3. Struktur organisasi yang mendukung
4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan

Kelemahan yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat

Analisis Faktor Eksternal

Peluang yang terdiri dari :

1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan yang bisa diikuti
2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan
3. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda
4. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah

Ancaman yang terdiri dari :

1. Masih rendahnya koordinasi SKPD dengan Bapelitbangda
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah
4. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah

4.3.1 Formulasi Strategi

Dalam melakukan analisis isu-isu strategis ini dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu strategis menjadi suatu formulasi strategi yang

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021

dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang akan diambil. Dengan menggunakan formulasi SWOT diperoleh strategi S-T, S-O, W-O dan W-T. Berikut merupakan tabel analisis isu-isu strategis.

INTERNAL	STRENGTHS/KEKUATAN	WEAKNESSES/KELEMAHAN
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya motivasi kerja pegawai 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 3. Struktur organisasi yang mendukung 4. Ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pengambilan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis yang menjadi dasar penyusunan perencanaan 2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan 4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat
OPPORTUNITIES/PELUANG	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perencanaan yang bisa diikuti 2. Kian meluasnya akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan 3. Adanya Undang-Undang dan Perda yang mengatur mengenai wewenang dan tupoksi Bapelitbangda 4. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman secara berkala aparatur perencana mengikuti diklat teknis 2. Peningkatan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana 3. Peningkatan etos kerja 4. Bentuk sistem efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan pendidikan bagi personil sesuai dengan kebutuhan 2. Penyediaan software dan database yang mendukung proses perencanaan yang transparan dan akuntabel 3. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian aplikatif sebagai rujukan bagi pelaksanaan pembangunan
THREATS/SANCAMAN	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya koordinasi SKPD dengan Bapelitbangda 2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Situasi dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah 4. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuat struktur organisasi dengan menempatkan personil yang handal dalam menjalankan tupoksi dan koordinasi dengan instansi terkait 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Ciptakan koordinasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan 4. Ciptakan sistem informasi data yang akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan personil sesuai dengan bidang keahlian 2. Pembinaan terhadap personil yang kurang disiplin dan termotivasi 3. Perkuat kordinasi internal guna melaksanakan koordinasi dengan SKPD 4. Penyediaan sistem pendukung proses perencanaan dan software

Setelah dilakukan analisis SWOT di atas, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dapat dipergunakan dalam mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman secara berkala aparatur perencana mengikuti diklat teknis
2. Peningkatan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana
3. Peningkatan etos kerja

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah 2016-2021

4. Bentuk sistem efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan
5. Tingkatkan pendidikan bagi personil sesuai dengan kebutuhan
6. Penyediaan software dan database yang mendukung proses perencanaan yang transparan dan akuntabel
7. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian aplikatif sebagai rujukan bagi pelaksanaan pembangunan
8. Perkuat struktur organisasi dengan menempatkan personil yang handal dalam menjalankan tupoksi dan koordinasi dengan instansi terkait
9. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Ciptakan koordinasi antar aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan
11. Ciptakan sistem informasi data yang akurat
12. Penempatan personil sesuai dengan bidang keahlian
13. Pembinaan terhadap personil yang kurang disiplin dan termotivasi
14. Perkuat kordinasi internal guna melaksanakan koordinasi dengan SKPD
15. Penyediaan sistem dan software pendukung proses perencanaan

4.3.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sarana serta prasarana perencanaan pembangunan di Kota Batam
2. Meningkatkan kualitas kegiatan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi guna memperoleh umpan balik, masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari perencanaan pembangunan.
3. Mewujudkan penguatan dan pengembangan sistem informasi dan data dalam perencanaan pembangunan Kota Batam yang akurat, komprehensif dan selalu terbaharukan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas program Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- Program : 1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : 1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program : 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Kegiatan : 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program : 3 Perencanaan Pembangunan Daerah**
Kegiatan : 1 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Batam
Kegiatan : 2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Batam
Kegiatan : 4 Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan
Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan
Kegiatan : 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota
Batam

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah 2016-2021

Kegiatan	:	6	Kajian Awal Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026
Kegiatan	:	7	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026
Program	:	4	Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	1	Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Kegiatan	:		Pengembangan Sistem E-Planning
Kegiatan	:	2	Kajian Kajian pencegahan korupsi melalui pembangunan Zona Integritas
Kegiatan	:	3	Kajian Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam
Kegiatan	:	4	Kajian Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Pembangunan Kota Batam
Kegiatan	:	5	Kajian Analisis potensi sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan Terpadu di Kota Batam
Kegiatan	:		Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kegiatan	:		Kajian Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan
Kegiatan	:	7	Kajian Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)
Kegiatan	:		Kajian Konsep penataan kawasan kampung tua Kota Batam
Kegiatan	:	8	Kajian Tataan Transportasi Lokal (Tatralok)
Kegiatan	:	9	Kajian pengembangan pola Investasi Daerah di Kota Batam
Kegiatan	:	10	Analisis Kinerja Program Dana bergulir dalam Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan	:		Kajian pemanfaatan dan pengelolaan Program Infrastruktur Kecamatan (PIK)
Kegiatan	:	11	Kajian Analisis keikutsertaan kegiatan promosi terhadap
Kegiatan	:	12	

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah 2016-2021

			tingkat pertumbuhan investasi Kota Batam
Kegiatan	:		Studi keterpaduan pembangunan infrastruktur
	:	13	Analisis pencapaian SDGs Kota Batam
	:		Kajian kenaikan tarif rusun di Kota Batam
Kegiatan	:	14	Kajian kontribusi beasiswa masyarakat miskin terhadap keberlangsungan pendidikan di Kota Batam
Kegiatan	:	15	Analisis Potensi Unggulan Kota Batam
	:		Sustainable Development Goals (SDGs) dan
Kegiatan		16	Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan		17	
Kegiatan		18	
Kegiatan		19	
Kegiatan		20	
Kegiatan		21	
Program	:	5	Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	1	Penyusunan Buku Potret Pembangunan Daerah Kota Batam

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF OPD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra					
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan Kota Batam	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil RKPD yang diakomodir dalam APBD	45%	80%	470,000,000	85%	493,500,000	90%	518,175,000.00	90%	544,083,750	95%	571,287,937.50	95%	2,237,046,687.5	Bapelitbangda	Kota Batam		
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	2 dokumen	400,000,000.00	2 dokumen	420,000,000.00	2 dokumen	441,000,000.00	2 dokumen	463,050,000.00	2 dokumen	486,202,500.00	10 dokumen	1,850,252,500.00	Bapelitbangda	Kota Batam		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	Tersusunnya laporan tahunan	1 laporan	1 laporan	70,000,000.00	1 laporan	73,500,000.00	1 laporan	77,175,000.00	1 laporan	81,033,750.00	1 laporan	85,085,437.50	5 laporan	386,794,187.50	Bapelitbangda	Kota Batam		
		Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	85%	65%	320,000,000.00	100%	336,000,000.00	100%	352,800,000.00	100%	370,440,000.00	100%	388,962,000.00	100%	1,768,202,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam		
		Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	675,000,000.00	1 Dokumen	675,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam		
		Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	4 dokumen	4 dokumen	120,000,000.00	4 dokumen	126,000,000.00	4 dokumen	132,300,000.00	4 dokumen	138,915,000.00	4 dokumen	145,860,750.00	20 dokumen	663,075,750.00	Bapelitbangda	Kota Batam		

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021

		Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	75%	100%	200,000,000.00	100%	210,000,000.00	100%	220,500,000.00	100%	231,525,000.00	100%	243,101,250.00	100%	1,105,126,250.00	Bapelitbangda	Kota Batam
		Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	Persentase OPD yang dievaluasi dokumen perencanaannya	-	100%	200,000,000.00	100%	210,000,000.00	100%	220,500,000.00	100%	231,525,000.00	100%	243,101,250.00	100%	1,105,126,250.00	Bapelitbangda	Kota Batam
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan			1,222,250,000.00		2,738,362,500.00		2,705,280,625.00		2,928,444,656.25		2,711,696,889.06		11,856,034,670.31	Bapelitbangda	Kota Batam
		Pengembangan Sistem E-Planning	Terlaksananya pengembangan sistem e-planning	Tidak ada	1 sistem	322,250,000.00	1 sistem	338,362,500.00	1 sistem	355,280,625.00	1 sistem	373,044,656.25	1 sistem	391,696,889.06	1 sistem	1,780,634,670.31	Bapelitbangda	Kota Batam
		Kajian pencegahan korupsi melalui pembangunan Zonal Integritas	Tersedianya dokumen persiapan pelaksanaan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tidak ada	1 dokumen pelaksanaan WBK dan WBBM	450,000,000.00										450,000,000.00	Bapelitbangda	
		Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam	Tersedianya Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)	Tidak ada	1 dokumen Rencana Aksi SiDa	450,000,000.00										450,000,000.00	Bapelitbangda	
		Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Pembangunan Kota Batam	Tersedianya Sistem Informasi Geografis (GIS) Pembangunan Kota Batam	Ada	-	-	1 sistem	600,000,000.00	1 sistem	550,000,000.00	1 sistem	530,000,000.00	1 sistem	520,000,000.00	1 sistem	2,200,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam
		Analisis potensi sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Terpadu di Kota Batam	tersedianya analisis wilayah yang memiliki potensi untuk dibangun sarana dan prasarana PPI terpadu di kawasan Hinterland	Tidak ada	-	-	1 dokumen potensi pembangunan PPI Terpadu di wilayah Batam	450,000,000.00								450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021

	Kajian Rencana Perindugandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tidakada	-	-	1 dokumen RPPLH	450,000,000.00							450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam	
	Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan	Tidakada	-	-	1 dokumen master plan ketahanan pangan	450,000,000.00							450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam	
	Kajian Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)	Tidakada	-	-	1 dokumen RISPAL Kota Batam	450,000,000.00							450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam	
	Konsep penataan kawasan kampung tua sesuai dengan konsep untuk mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat	Tidakada	-	-	-	-	1 dokumen rancangan konsep pengembangan kampung tua dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung tua	450,000,000.00						450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam
	Kajian Tata Nuan Transporasi Lokal (Tatralok)	Tidakada	-	-	-	-	1 dokumen Tatralok Kota Batam	450,000,000.00						450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam
	Kajian pengembangan pola Investasi Daerah di Kota Batam	Tidakada	-	-	-	-	1 dokumen pola investasi Kota Batam	450,000,000.00						450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam
	Analisis Kinerja Program Dana bergulir dalam Pemberdayaan Masyarakat	Tidakada	-	-	-	-	1 dokumen evaluasi kinerja pengelolaan dan bergulir	450,000,000.00						450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021

		Kajian pemanfaatan pengelolaan Program Infrastruktur Kecamatan (PIK)	terlaksananya kajian pemanfaatan terhadap masyarakat dan Program Infrastruktur Kecamatan (PIK)	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	1 doku menevaluasi pelaksanaan Program Infrastruktur Kecamatan (PIK)	450,000,000.00			450,000,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam
		Kajian Awal Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026	Tersusunnya Dokumen Kajian Awal Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	675,400,000.00	-	-	675,400,000.00	Bapelitbangda	Kota Batam
		Studi keterpaduan pembangunan infrastruktur	terlaksananya kajian penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	1 doku menkajian	450,000,000.00			450,000,000.00	Bapelitbangda	
		Analisis pencapaian SDGs Kota Batam	terlaksananya evaluasi pelaksanaan program terhadap pencapaian SDGs	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	1 doku menevaluasi pelaksanaan SDGs 5 tahun pertama	450,000,000.00				Bapelitbangda	
		Kajian kenaikan tarif bus di Kota Batam	Terlaksananya data rencana kenaikan tarif bus di Kota Batam	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	1 doku menkajian	450,000,000.00	450,000,000.00	Bapelitbangda	
		Kajian kontribusi beasiswa masyarakat miskin (BSM) terhadap keberlangsungan pendidikan di Kota Batam	Tersedianya data kontribusi Beasiswa Siswa Miskin (BSM) terhadap keberlangsungan pendidikan di Kota Batam dari Angka Patus Sekolah (APS)	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	1 doku menkajian BSM terhadap APS	450,000,000.00	450,000,000.00	Bapelitbangda	

Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah 2016-2021

		Analisis Potensi Unggulan Kota Batam	Tersedianya data potensi unggulan pengembangan sektor basis dan non basis di Kota Batam	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen kajian potensi unggulan Kota Batam	450,000,000.00	450,000,000.00	Bapelitbangda		
		Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya kajian program penanganan kemiskinan secara menyeluruh dan saling interdependen beberapa program kegiatan lainnya	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen evaluasi pelaksanaan SDGs terhadap pengentasan kemiskinan	450,000,000.00	450,000,000.00	Bapelitbangda		
		Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah	Persentase Data yang tersedia sebagai bahan perencanaan		75%	150,000,000.00	80%	157,500,000.00	95%	165,375,000.00	100%	173,643,750.00	100%	182,325,937.50	100%	828,844,687.50	Bapelitbangda	Kota Batam
		Penyusunan Buku Potret Pembangunan Daerah Kota Batam	Jumlah data pembangunan yang valid dan akurat	-	1 dok	150,000,000.00	1 dok	157,500,000.00	1 dok	165,375,000.00	1 dok	173,643,750.00	1 dok	182,325,937.50	5 dok	828,844,687.50	Bapelitbangda	Kota Batam
Meningkatkan kualitas lembaga Bapelitbangda	Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi	Tersedianya administrasi	100%	100%	4,559,206,676.12	100%	4,878,351,143.45	100%	5,219,835,723.49	100%	5,585,224,224.13	100%	5,864,485,435.34	100%	26,218,807,687.02		Kota Batam
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	100%	100%	4,559,206,676.12	100%	4,878,351,143.45	100%	5,219,835,723.49	100%	5,585,224,224.13	100%	5,976,189,919.82	100%	26,218,807,687.02	Bapelitbangda	Kota Batam
		Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan terpeliharanya Saran dan Prasarana Aparatur	100%	100%	685,886,323.00	100%	720,180,639.15	100%	756,189,671.11	100%	793,999,154.66	100%	833,699,112.40	100%	3,789,954,900.32		Kota Batam
		Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Saran dan Prasarana Aparatur	100%	100%	685,886,323.00	100%	720,180,639.15	100%	756,189,671.11	100%	793,999,154.66	100%	833,699,112.40	100%	3,789,954,900.32	Bapelitbangda	Kota Batam

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BATAM

6.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapelitbangda Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021.

Perumusan indikator kinerja Bapelitbangda Kota Batam yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Bapelitbangda Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021.

Tabel VI.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
			Target	Target	Target	Target	Target	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	65%	75%	85%	90%	95%	95%	95%
	Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	16 kajian	3 kajian	4 kajian	5 kajian	6 kajian	7 kajian	51 kajian

6.2 Penutup

Disusunnya RENCANA STRATEGIS (**RENSTRA**) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam ini sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, dengan harapan dapat memberikan arahan, bimbingan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Bapelitbangda Kota Batam, karena RENSTRA SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA-SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Bapelitbangda Kota Batam, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian (Pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana yang akhirnya dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan Kota Batam Yang berkualitas dan terintegrasi selaras dengan rencana Kota Batam untuk menciptakan " ***Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat***"